

ABSTRAK

Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain. Salah satu bentuk dari perbuatan tindak pidana ialah melakukan pemerasan. Pada Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri menegaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pemerasan diancam dengan sanksi pidana. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemerasan secara bersama-sama berdasarkan putusan hakim nomor: 443/Pid/2025/PN.Jmb. Apakah pertanggungjawaban yang di jatuhkan melalui vonis majelis hakim terhadap pelaku pemerasan secara bersama-sama berdasarkan putusan hakim nomor: 443/Pid/2025/PN.Jmb sudah mencerminkan rasa keadilan bagi korban memberikan efek jera terhadap terdakwa. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah menggunakan Dokumen sekunder (*Putusan Pengadilan Negeri Jambi*). Berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembeda yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 368 Ayat (1) KUHP tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (Dua) tahun penjara. Pertanggungjawaban yang di jatuhkan melalui vonis majelis hakim terhadap pelaku pemerasan secara bersama-sama masih terlalu ringan mengingat terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerasan yang di anggap sangat meresahkan dan merugikan. Maka dakwaan jaksa yaitu 3 (tiga) tahun penjara dan vonis hakim yang hanya menjatuhkan 2 (dua) tahun penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan korban pada khususnya. mengenai vonis hakim yang hanya menjatuhkan 2 (dua) tahun penjara, memang benar bahwa Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana tersebut, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut hakim dibatasi oleh aturan-aturan pemidanaan. Saran yang dikemukakan hendaknya hakim memvonis terdakwa lebih berat, tidak mengurangi dari tuntutan jaksa, kalau perlu melakukan ultra petita (memvonis lebih dari tuntutan). Hal ini bertujuan memberikan efek jera terdakwa agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan yang sama.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Pemerasan Secara Bersama-Sama Berdasarkan Putusan Hakim

ABSTRACT

The criminal acts regulated in the Criminal Code have their own limitations to differentiate between one criminal act and another. One form of criminal act is extortion. Article 368 Paragraph (1) of the Criminal Code itself states that a person who commits the crime of extortion is threatened with criminal sanctions. The problem raised is how the judge's considerations in imposing a sentence on the perpetrators of extortion jointly based on the judge's decision number: 443/Pid/2025/PN.Jmb. Does the responsibility imposed through the verdict of the panel of judges against the perpetrators of extortion jointly based on the judge's decision number: 443/Pid/2025/PN.Jmb reflect a sense of justice for the victim and provide a deterrent effect on the defendant. This research is descriptive analytical. In writing this thesis, the author uses a normative legal approach. One of the data sources used by the author as the research object is a secondary document (Jambi District Court Decision). Based on consideration of the elements in Article 368 Paragraph (1) of the Criminal Code, the defendant has been legally and convincingly proven to have committed a crime as charged by the public prosecutor and because there is no excuse for the unlawful nature and no justification for the defendant's fault, the defendant *must be declared guilty and the defendant must be given a punishment commensurate with his actions*, the threat of which according to Article 368 Paragraph (1) of the Criminal Code is a maximum of 9 (nine) years imprisonment. However, in this case the defendant was sentenced to 2 (two) years imprisonment. The responsibility imposed through the verdict of the panel of judges against the perpetrators of extortion together is still too light considering that the defendant has committed a criminal act of extortion which is considered very disturbing and detrimental. Therefore, the prosecutor's charge of 3 (three) years in prison and the judge's verdict of only 2 (two) years in prison are considered to still not reflect the sense of justice in society and the victim in particular. Regarding the judge's verdict of only 2 (two) years in prison, it is true that the judge has the substance to impose such a sentence, however, in imposing such a sentence the judge is limited by the rules of sentencing. The suggestion is that the judge should sentence the defendant more severely, not less than the prosecutor's demand, or, if necessary, impose an ultra petita sentence (a sentence exceeding the demand). This aims to provide a deterrent effect to the defendant, preventing him from committing the same crime in the future.

Keywords: Criminal Responsibility, Joint Extortion Perpetrators Based on Judge's Decision